

Pengantar:
Prof. Dr. KH. Miftah Faridl

MERETAS JALAN DAKWAH BENANG MERAH GERAKAN ORMAS ISLAM



MUHAMMADIYAH



MAJELIS ULAMA
INDONESIA



PERSIS



SYARIKAT ISLAM



NAHDATUL ULAMA



PERSATUAN UMAT
ISLAM



AL-JAM'IYATUL
WASHLIYAH



AL-IRSYAD
AL-ISLAMİYAH



MATLAHUL ANWAR

Editor:
Prof. Dr. Asep S Muhtadi, M.A.
Dr. H. Irfan Safrudin, M.Ag.



MERETAS JALAN DAKWAH

Benang Merah Gerakan Ormas Islam

Editor

Prof. Dr. Asep S. Muhtadi, MA

Dr. H. Irfan Safrudin, M. Ag

Pengantar

Prof. Dr. KH. Miftah Faridl

MERETAS JALAN DAKWAH
Benang Merah Gerakan Ormas Islam

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. KH. Miftah Faridl
Ketua	: Prof. Dr. Asep Saeful Muhtadi, M.A
Sekretaris	: Dr. H. Irfan Safrudin, M.Ag
Anggota	: KH. Maftuh Kholil Dr. KH. Asep Zaenal Ausop, M.A Drs. KH. Hajar Sanusi, M.Ag Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag Rifki Ali Mubarak, S.Ag, M.Si H. Arif Ramdhani, S.Pd.I Drs. H. Hamid Balfas

Editor	: Asep S. Muhtadi dan Irfan Safrudin
Layout	: kelik nw
Disain Cover	: sp

Cetakan Pertama : Rajab 1433 H/Juni 2012

Penerbit : MUI Kota Bandung
Jalan Sadang Serang, 13 Bandung

ISBN: 978-979-17813-1-2

PENGANTAR PENERBIT

SEJAK terbit buku *Ulama-ulama Perintis* pada 2008, muncul pemikiran untuk menyajikan dimensi ruang sosial perjalanan kiprah para ulama dimaksud. Asumsinya jelas, tidak ada satu gerakan sosial pun, termasuk organisasi massa keagamaan, yang berlangsung dalam ruang hampa. Lebih-lebih situasi Indonesia yang saat kelahiran ormas-ormas keagamaan itu lahir tengah dalam suasana penuh perjuangan menjelang kemerdekaan.

Karena itu, jika buku pertama seperti disebutkan di atas mengungkap kiprah dan jejak pengabdian para ulama khususnya melalui organisasi massa masing-masing, maka buku kedua ini akan mengungkap potret perjalanan wadah kelembagaan yang menjadi tempat berkiprahnya selama kurun waktu tertentu. Karena luasnya lapangan kiprah ormas-ormas Islam, secara spesifik buku ini berusaha memotret aktivitas dakwah yang menjadi gerakan utamanya. Itulah sebabnya, buku yang menghimpun pemikiran dari para penulisnya ini diberi identitas *Meretas Jalan Dakwah* dan diberi anak judul *Benang Merah Gerakan Ormas Islam*.

Sesuai warna orientasi yang diperankan setiap ormas, para kontributor tulisan pada buku ini tampak berusaha memilih fokus secara tematis sesuai kecenderungan masing-masing. Dari gagasan lepas para penulis tentang tema dakwah ormas ini selanjutnya dikategorisasi ke dalam tiga bagian: gerakan sosial, gerakan pendidikan, dan gerakan politik. Pemilahan menjadi tiga kategorisasi ini tentu tidak dimaksudkan untuk memperkecil arti dan eksistensi ormas, tapi sekedar untuk mempermudah dalam membaca pikiran para penulisnya.

Pemilihan ormas-ormas seperti tertuang dalam buku ini tentu saja tidak didasarkan pada nominasi kualitatif ataupun kuantitatif. Ia hanya didasarkan pada kemampuan tim penyusun dalam memperoleh tulisan dari para pakar dan pemerhati, serta keterbatasan fasilitas dalam usaha memperoleh tulisan lebih banyak. Hanya ini yang dapat kami himpun, dengan satu keyakinan masih banyak ormas lain yang sama-sama berkiprah dan masih banyak kiprah lain yang diperankan ormas-ormas yang hingga kini tetap hadir dalam dinamika masyarakat Indonesia.

Akhirnya, kami persembahkan buku ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat Muslim khususnya di Indonesia, sekecil apapun. Di sana-sini tentu masih ditemukan kekurangan-kekurangan. Mungkin kekurangan inilah yang akan menjadi lahan amal shalih bagi para pembaca untuk mengkritisnya.

ASM

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ____ v

Catatan Editor ____ vii

Ormas dan Peran Kulturalisasi Islam

Prof. Dr. KH. Miftah Faridl ____ xiii

Daftar Isi ____ xxiii

Majelis Ulama Indonesia Meletakkan Peran dan Posisi Ulama

Dr. Irfan Safrudin, M.Ag ____ 1

GERAKAN SOSIAL

- Dakwah dan Gerakan Pembaruan Muhammadiyah

Prof Dr. Asep S Muhtadi, MA ____ 45

- PUI Melintasi Zaman dengan Dakwah

Dr. Sulasman, M.Hum ____ 55

- Pergeseran Komunikasi Dakwah Persis

Drs. Nurmawan, M.Ag ____ 69

- Aktualisasi Dakwah Nahdlatul Ulama di Era Globalisasi
Ekonomi

Prof. Dr. H. Ali Anwar Yusuf ____ 83

- MUI: Eksistensi, Ekspektasi, Kontribusi, dan Kontroversi

Dr. Agus Ahmad Safei ____ 93

- Belajar dari Sejarah, Berjuang Demi Masa Depan

Drs. Nandang Koswara, M.Pd ____ 115

GERAKAN PENDIDIKAN

- PUI, Berdakwah Melalui Sekolah
Prof Dr. Asep S Muhtadi, MA _____ 131
- Benang Merah Dakwah Mathla'ul Anwar
Didin Nurul Rosidin, MA., Ph.D _____ 147
- Konsep Pendidikan Modern Al-Irsyad
Dr. Ahmad Hasan Ridwan _____ 161
- Pergulatan Persatuan Islam dalam Dakwah di Tatar Sunda
Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum _____ 171
- Pesantren Muhammadiyah Cetak Ulama-Intelek-Profetik-
Transformatif
Hendar Riyadi, M.Ag _____ 187

GERAKAN POLITIK

- Jejak-jejak Dakwah Politik Nahdlatul Ulama
Prof Dr. Asep S Muhtadi, MA ____ 205
- Revitalisasi Gerakan Dakwah Muhammadiyah
Roni Tabroni, S.Sos., M.Si ____ 227
- Pemikiran dan Aliansi Politik Persatuan Islam
Dr. Badri Khaeruman _____ 249
- Al-Washliyah: Zending Islam dari Tanah Batak
Drs. A. Hajar Sanusi, M.Ag _____ 293
- SI Pelopor Gerakan Sosial Politik Menuju Indonesia Merdeka
Dr. M. Wildan Yahya, M.Pd _____ 319

PUSTAKA RUJUKAN _____ 361

TENTANG PENULIS _____ 369

BENANG MERAH DAKWAH MATHLA'UL ANWAR

Didin Nurul Rosidin, M.A., Ph. D

MATHLA'UL ANWAR (MA) yang didirikan oleh para kiai Banten pada bulan Juli 1916 lebih tua 10 tahun dari Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan pada bulan Januari 1926 dan 4 tahun lebih muda dari Muhammadiyah. Namun dibandingkan dengan dua organisasi Islam Indonesia terbesar tersebut, MA nampaknya harus berkaca diri. Tidak banyak yang tahu tentang kiprah organisasi ini sekalipun di kalangan sarjana ahli Indonesia. Hanya beberapa sarjana seperti Deliar Noer, Karel Steenbrink, Martin van Bruinessen dan Andrée Feillard yang pernah menyebut nama organisasi ini dalam karya mereka. Itupun sebagian besar karya tersebut salah dalam mendeskripsikan organisasi ini. Feillard, misalnya, menyatakan Jenderal Alamsyah Ratu Prawiranega adalah pendiri organisasi. Sementara Deliar Noer memasukkan MA sebagai anggota istimewa Masyumi. Gambaran yang salah ini tentunya tidak lepas dari minimnya informasi tentang MA yang sampai ke publik.

Hal tersebut tentunya memunculkan pertanyaan, mengapa MA yang termasuk organisasi sosial Islam angkatan pertama tidak banyak dikenal? Tentunya tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan

memfokuskan pada tiga aspek utama organisasi ini yaitu pendidikan, politik organisasi dan perilaku politiknya dan pemikiran keagamaan. Pembahasan atas ketiga aspek tersebut didasarkan pada beberapa pertanyaan lanjutan, antara lain; Apa sebenarnya peran signifikan organisasi ini selama kurun waktu itu? Bagaimana MA merespon berbagai perubahan politik yang terjadi? Bagaimana MA menempatkan diri dalam diskursus keislaman?.

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, makalah ini akan mencoba memetakan persoalan yang dihadapi sekarang berdasarkan perjalanan sejarah yang ada untuk dijadikan sebagai *'ibrah* ke depan.

Pembaharu Sistem Pendidikan Islam

Sejak munculnya kesadaran akan pentingnya mobilisasi umat untuk terbebas dari keterpurukan akibat kolonialisme, para pendiri yang notabene kiai lokal Menes telah sepakat untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka juga bersepakat untuk menjadikan sistem madrasah yang berbasis kelas sebagai alternatif terbaik bagi lembaga pendidikan yang akan dibangun. Model pendidikan modern sebenarnya sama sekali baru bagi komunitas Muslim nusantara, mengingat model tersebut baru diperkenalkan pada dekade kedua abad ke 20 ketika sekolah/madrasah sejenis didirikan di beberapa tempat seperti Normal School dan Adabiyah di Padang serta Manba'ul Ulum di Solo.

Aplikasi model pendidikan Islam ini merupakan terobosan sekaligus keberanian yang luar biasa karena masyarakat Muslim saat itu telah lama diyakinkan model-model seperti pangajian di musholla, langgar, surau dan pesantren merupakan model pendidikan yang paling sesuai dan "islami". Terkait dengan MA, tentunya patut dicatat secara khusus jika melihat latar belakang pendiri MA yang justru pengelola model pendidikan lama tersebut. Hal ini tidak lepas dari sikap terbuka mereka akan gagasan-gagasan

baru yang lebih tepat seperti terlihat dari pernyataan salah seorang tokoh pendiri, K.H. Muhammad Sholeh. Beliau menyatakan dirinya bukan hanya tidak mampu mengelola lembaga pendidikan tersebut tetapi juga tidak mengenalnya dengan baik. Oleh karena itu, lembaga ini harus diserahkan kepada seseorang yang mengetahui dan mampu mengelola lembaga pendidikan baru tersebut. Keterbukaan ini merupakan fondasi utama berdirinya madrasah modern MA pertama di Menes, bahkan di Banten, sebelum kemudian berdiri Al-Khairiyah pada tahun 1920-an.

Kesadaran akan pentingnya sistem pendidikan Islam alternatif ini juga tidak lepas dari beberapa kenyataan yang terjadi saat itu. Diantara yang paling menonjol dan sering kali digarisbawahi adalah gagalnya sistem pendidikan Islam lama untuk menarik minat anak muda sebagai generasi penerus untuk masuk pesantren dan gagalnya pesantren untuk "memproduksi" calon-calon pemimpin umat yang sadar akan tantangan zaman. Faktor lainnya adalah intensifnya gerakan sekularisasi dan westernisasi oleh pemerintah kolonial melalui pendirian sekolah-sekolah rakyat di pedesaan dengan materi umum sebagai objek pelajarannya. Kedua faktor inilah yang diantaranya memainkan peranan penting dalam proses penerimaan sistem pendidikan baru oleh para kiai.

Tekad untuk melakukan perubahan pada umat lewat modernisasi sistem pendidikan Islam pada masa selanjutnya disebarkan pula ke wilayah lain di luar Menes bahkan Banten. Para aktifis dan tokoh pendidikan MA di Menes bekerjasama dengan warga lokal atau migran asal Banten mendirikan madrasah-madrasah modern sekaligus menjadikannya sebagai cabang madrasah pusat MA. Hasilnya sungguh spektakuler. Hanya dalam jangka 20 tahun, MA telah memiliki lebih dari 40 madrasah cabang yang tersebar di wilayah Banten, Bogor dan Lampung. Seperti halnya Hayatul Qulub di Majalengka, gerakan pembaharuan pendidikan ini memfokuskan pada masyarakat dan wilayah pedesaan sehingga gerakan ini termasuk pada kategori *a rural-based movement* (gerakan berbasis desa).

Semangat modernisasi sistem pendidikan Islam juga terjadi pada wilayah kurikulum dengan diperkenalkannya beberapa materi umum seperti ilmu bumi, ilmu ukur dan lain-lain sejak kendali pendidikan MA masih ditangan kiai Mas Abdurrahman. K.H. Uwes Abu Bakar kemudian mempertahankan semangat ini pada saat menerima aturan pemerintah Indonesia merdeka yang menetapkan jenjang sekolah/madrasah menjadi SD (6 tahun), MTs (3 tahun), MA (tiga tahun) dan perguruan tinggi. Berdasarkan aturan tersebut, MA memutuskan untuk membagi sembilan tingkatan kelas ke dalam tingkatan Ibtidaiyah (MI) dan Tsanawiyah (MTs) untuk membagi sembilan kelas madrasah ke dalam dua level pendidikan (Ibtidaiyah dan Tsanawiyah). Kiai Uwes juga menerima aturan untuk memasukkan materi-materi umum lainnya termasuk bahasa Inggris dalam kurikulum madrasah. Bahkan, Kiai Uwes berinisiatif untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang pertama di wilayah Pandeglang dimana sebagian besar materi pengajarannya justru materi-materi umum sebelum kemudian sekolah ini berubah menjadi Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP). Ketika Kementrian Agama meluncurkan program Madrasah Wajib Belajar (MWB) untuk mengintensifikasi pengajaran materi umum pada siswa madrasah, MA termasuk organisasi yang paling mendukung dengan menyediakan seluruh madrasahny sebagai tempat aplikasi program ini.

Keberhasilan untuk menyebarkan pengaruhnya melebihi dua provinsi dan adanya pengakuan secara legal dari pemerintah terhadap status madrasah dan status organisasi, MA berhasil memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk program subsidi pendidikan. Pencapaian ini telah menjadikan MA sebagai salah satu organisasi yang telah banyak menerima proposal penggabungan dari sekolah/madrasah lokal yang berasal dari berbagai daerah bahkan pulau seperti Al-Iman dari Magelang, Nahdlatul Wathan dari NTB dan lain-lain. Sebagai dampak langsung dari fusi madrasah/sekolah ini, MA pada awal tahun 1960-an tercatat sebagai organisasi massa Islam terbesar ketiga dibawah NU dan Muhammadiyah.

Perkembangan progressif ini bukan berarti tanpa tantangan, terutama ketika terjadi perubahan kepemimpinan dimana para pendirinya telah banyak meninggal dunia dan munculnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki sumber legitimasi yang berbeda-beda. Munculnya kiai Uwes yang bukan berdarah "biru" keturunan para pendiri telah menciptakan perpecahan internal dengan munculnya madrasah Maslahul Anwar yang didirikan oleh kiai Junaedi, putra kiai Yasin, di Kaduhauk yang terpisah dari struktur madrasah MA. Kemunculan madrasah ini merupakan titik mula munculnya madrasah-madrasah baru baik itu di pusat MA (Menes) maupun di beberapa wilayah/cabang tertentu seperti Al-Ma'arif sebelum kemudian berubah menjadi Ahlussunnah Wal Jamaah pada akhir tahun 1970-an, Anwarul Hidayah, MALNU, MALINU dan Nurul Amal.

Selain faktor kepemimpinan pada tingkat elit, kemunculan madrasah-madrasah baru tersebut merupakan akibat dari adanya perbedaan persepsi dan kepentingan berbagai kelompok dalam MA. Misalnya, pendirian madrasah Al-Ma'arif yang diprakarsai oleh K.H. Abdul Latif, K.H. Asrori dan K.H. Hamdani merupakan akibat dari perbedaan orientasi politik antara apakah harus mempertahankan ikatan politik dan agama dengan NU atau Masyumi. Selain karena perbedaan afiliasi politik, penolakan para kiai senior terhadap upaya modernisasi sekolah dengan memasukkan materi-materi umum, khususnya Bahasa Inggris, mendorong para kiai dan pengikutnya yang ada di madrasah keluar. Yang menarik dari peristiwa ini adalah bagaimana madrasah tidak hanya berfungsi secara konvensional sebagai tempat mentransfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid tetapi juga menjadi salah satu simbol identitas politik sekaligus alat memobilisasi masa pengikut. Hal yang tidak jauh berbeda ketika pada tahun 1980-an dan 1990-an ketika muncul madrasah-madrasah baru seperti al-Ishlah, Al-Jannah dan lain-lain.

Melihat realitas di atas, kita bisa mengatakan bahwa meskipun madrasah dalam MA tidak hanya sebagai tempat mendidik generasi-generasi baru Muslim tetapi juga sebagai media memobilisasi

politik, sepak terjang MA sangat erat kaitannya dengan gerakan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Tentunya untuk masa yang akan datang, identitas MA sebagai pembaharu pendidikan Islam harus terus dipertahankan, apalagi ketika bangsa Indonesia masih terpuruk dalam hal kualitas pendidikan apalagi menyangkut pendidikan Islam.

Politik dengan Nama

Berbeda dengan bidang pendidikan dimana MA tampil atas nama dan benderanya sendiri, MA dalam bidang politik cenderung untuk menggandengkan diri dengan kekuatan politik yang ada. Hampir bersamaan dengan pendirian MA, para pendiri seperti kiai Yasin dan kiai Abdurrahman telah menjadi tokoh utama Syarikat Islam (SI) di wilayah Banten. Dalam fatwanya, kiai Abdurrahman mengkategorikan dukungan kepada SI sebagai salah satu wujud dari ibadah ke Allah SWT. Namun ketika SI mengalami kemunduran akibat konflik internal, banyak tokoh MA termasuk kiai Abdul Hadi Bangko bergabung dengan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan terlibat dalam pemberontakan tahun 1926.

Semakin dominannya kelompok modernis dalam tubuh SI pada akhir tahun 1920-an dan semakin tidak kondusifnya aktivitas politik paska peristiwa 1926 mendorong kiai Yasin dan kiai Abdurrahman untuk mengalihkan aktivitas politiknya pada NU sejak tahun 1928. Kiai Yasin mengilustrasikan perubahan ini dengan istilah "ganti baju". Keterlibatan warga MA dalam aktivitas NU mencapai puncaknya ketika Menes pada tahun 1937 ditetapkan sebagai salah satu tempat berlangsungnya Konggres Nasional NU ke 13 yang akan dilaksanakan pada tahun 1938. Dalam sejarah NU, muktamar di Menes berperan besar dalam menghasilkan keputusan strategis, diantaranya kemungkinan untuk melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan organisasi. Keputusan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Muslimat NU pada tahun 1948. Karena

peristiwa bersejarah ini, kiai Abdurrahman tercatat sebagai salah satu ulama besar NU bersama dengan 30-an ulama NU kharismatik lainnya. Kedekatan kultural MA dan NU ini telah membentuk opini sebagian warga dua organisasi ini NU bahwa MA merupakan bagian dari NU sebagaimana diwujudkan dalam istilah *Mathla'ul Anwar Li Nahdlatil Ulama* atau MALNU. Nama ini pada akhir tahun 1960-an menjadi nama resmi salah satu yayasan pengelola madrasah/sekolah di Menes. Secara struktural, para pengurus MA juga menjadi pengurus NU baik di tingkat daerah maupun wilayah Banten dan Lampung.

Keyakinan dan realitas inilah yang menjadi argumentasi utama kelompok yang menolak keputusan Mukhtar MA tahun 1952 yang mendeklarasikan sikap non-afiliasi MA dalam politik. Dalam pandangan pendukung pro-NU ini, keputusan non-afiliasi politik tersebut merupakan siasat kelompok pro-Masyumi untuk mendapat legitimasi untuk terus aktif di partai modernis tersebut. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa beberapa tokoh MA menjadi anggota parlemen dari Masyumi seperti kiai Uwes Abu Bakar yang menjadi anggota DPR Pusat dan kiai Muslim di DPRD Pandeglang. Kedekatan politik MA ke Masyumi semakin kental manakala beberapa tokoh MA menjadi pendukung sikap oposisi Masyumi terhadap beberapa kebijakan Sukarno. Tidak heran jika setelah Masyumi dipaksa bubar pada tahun 1960, MA mendapat tekanan dari kelompok pro-Sukarno. Akibatnya, MA mengubah simbolnya dengan tujuan untuk menjelaskan ketidakadaitannya MA dengan Masyumi. Tidak cukup dengan itu, MA kemudian bergabung dengan front anti komunis yang kemudian membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Penolakan akan keterkaitan erat dengan Masyumi pada kenyataannya hanyalah taktik politik belaka karena setelah tumbanganya Sukarno para tokoh MA justru terlibat dalam pembentukan Badan Koordinasi Amal Muslimin Indonesia (BKAMI) dengan tujuan utama untuk merehabilitasi Masyumi yang pada

akhirnya ditolak oleh Suharto. Kegagalan tersebut mendorong politisi MA untuk terlibat dalam pembentukan partai baru, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi atau MI). Ketua umum MA bahkan secara resmi mengirimkan instruksi kepada seluruh pengurus MA di daerah untuk mendukung pembentukan pengurus partai di daerah masing-masing. Namun karena ada protes keras dari beberapa kelompok pro-non-afiliasi, ketua umum kemudian mengeluarkan instruksi baru yang mencabut instruksi yang pertama.

Makna non-afiliasi politik ini mengalami pergeseran ketika MA di bawah kepemimpinan kiai Muslim dan kiai Nafsirin Hadi. Non-afiliasi politik tidak lagi dalam konteks hubungan dengan salah satu partai yang ada karena dipandang satu paket politik Orde Baru tetapi justru berkaitan dengan sikap oposisi terhadap penguasa Orde Baru. Kedua pemimpin yang memiliki hubungan dekat dengan gerakan DI/TII ini sejak awal bersikap konfrontatif terhadap beberapa kebijakan Orde Baru. Sikap oposisi mereka pada level tertentu sangat ideologis seperti penolakan terhadap Pancasila. Sikap politik ini tentunya berdampak luar biasa pada eksistensi organisasi termasuk kegagalan untuk menyelenggarakan Muktamar Lampung tahun 1980 akibat penolakan pemerintah provinsi untuk memberikan izin penyelenggaraan.

Kondisi ini memunculkan konflik internal dimana sekelompok elit dengan dukungan penguasa Orde Baru mencoba untuk mengganti gaya kepemimpinan radikal kiai Nafsirin Hadi. Usaha ini berhasil pada Muktamar 1985 ketika kiai Burhani tampil sebagai ketua umum baru menggantikan Nafsirin Hadi yang secara tragis gagal untuk hadir dalam acara tersebut akibat intervensi pihak militer. Peristiwa ini juga menandai kembalinya sikap politik ambigu MA yang di satu sisi menyatakan independen dari partai politik manapun tetapi di sisi lain justru seperti menjadi bagian yang tak terpisahkan, kalau tidak boleh disebut ketergantungan, dari Golkar. Dibandingkan dengan masa sebelumnya ketika beberapa tokoh nasional direkrut untuk menduduki posisi tertentu, kebijakan

rekrutmen tokoh-tokoh Golkar dalam struktur kepengurusan sejak tahun 1985 begitu ekstrim termasuk posisi ketua umum Perguruan Pusat di Menes yang selama ini secara eksklusif berada ditangan kiai dan tokoh "asli" MA. Penunjukan Yusuf Alamsyah sebelum kemudian digantikan oleh Usep Fathudin merupakan episode dimana MA benar-benar kehilangan identitas mandirinya. Secara makro, kebijakan organisasi pun sangat tergantung pada restu ketua Dewan Pembina. Dengan kata lain, MA telah mengadopsi budaya politik internal Golkar yang menggunakan sistem komando (*top-down*). Akibatnya, suara-suara daerah menjadi tersumbat dan orientasi kegiatan organisasi menjadi elitis dan tidak mengakar.

Namun harus diakui bahwa pada masa inilah MA mencapai puncakekspansinya karena berhasil mencapai lebih dari 90% wilayah provinsi Indonesia yang ada saat itu dengan ratusan kepengurusan di tingkat kabupaten, meski kedalaman kepengurusan tersebut patut untuk diselidiki lebih lanjut. Keberhasilan juga terlihat pada perbaikan infrastruktur organisasi. MA berhasil membangun satu universitas untuk pertama kalinya dalam sejarah serta berhasil membangun dan memiliki gedung kantor pusat yang representatif. Lewat kedekatan politik di tingkat elit, beberapa pengurus wilayah/daerah juga dapat menikmati hasil positifnya termasuk pada posisi elit di pemerintahan tingkat lokal. Efek lainnya adalah adanya sekolah/madrasah lokal baru yang menyatakan bergabung dengan MA termasuk di Indramayu dan Kuningan.

Pemikiran Agama Nan Dinamis

Orang dengan mudah mengkategorikan NU sebagai perwakilan kelompok tradisional dan Muhammadiyah mewakili gerakan reformis atau modernis. Namun mereka akan kesulitan untuk mengkategorikan MA jika melihat sejarah perkembangan pemikiran Islamnya. MA mengalami perkembangan yang sangat dinamis dan tidak ajeg dalam bidang ini. Kondisi ini melahirkan

dua persepsi yang bertentangan. Di satu sisi, dinamika ini justru menunjukkan kedewasaan cara berpikir dalam bidang agama para tokoh dan warga MA dengan menolak sikap ekstrem pada salah satu aliran tertentu. Di sisi lain, hal ini menunjukkan kegagalan MA dalam merumuskan identitas keagamaannya sendiri. Mana yang tepat dari kedua pernyataan tersebut tentunya berpulang kepada warga MA sendiri.

Ketika MA berada ditangan para pendiri, MA dapat dikatakan sebagai pendukung kelompok tradisionalis. Mereka memutuskan keluar dari SI karena dominasi kelompok modernis untuk kemudian bergabung dengan NU. Meskipun dalam beberapa hal kiai Abdurrahman juga seringkali mengeluarkan fatwa yang justru bersikap tegas terhadap berbagai ritual keagamaan lokal di Banten yang dipandang tidak ada landasannya dalam teks agama, secara umum warga MA menganut paham tradisional. Perubahan baru terjadi ketika MA berada ditangan kiai Uwes yang banyak memiliki hubungan erat dengan tokoh modernis lewat aktivitas politiknya di Masyumi. Bukunya yang berjudul *Ishlahul Ummah Fi Bayani Ahli Sunnah wal Jamaah* secara *explicit* mendorong kaum Muslim untuk berpikir lebih rasional dalam memahami agama. Kiai Uwes misalnya menolak sikap sebagian kaum tradisionalis yang secara apriori menolak pemikiran Muhammad bin Abd al-Wahhab, Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh. Ia juga mendukung perlunya ijtihad bagi pengembangan pemahaman agama yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam bagian akhir bukunya, ia mengkritik kelompok yang apriori terhadap ide pembaharuan Islam sebagai akibat dari masih terkungkungnya oleh ide-ide warisan kolonial Belanda.

Pemikiran kiai Uwes ini mendapat dukungan yang kuat dari kiai Muslim yang menyebut periode dimana MA masih mengikuti tradisi pemikiran tradisional sebagai masa Mekkah sementara setelah banyak berdialog dengan kelompok modernis sebagai masa Madinah. Bahkan ketika perguruan berada dibawah kendalinya,

kiai Muslim membentuk semacam lasykar yang bertugas untuk menghancurkan semua tradisi lokal yang tidak Islami. Langkah radikalnya ini diikuti pula oleh beberapa pengurus perguruan dan beberapa kiai terutama kiai Basith. Akibatnya terdapat dua haluan besar pemikiran Islam yang terjadi di MA pada awal tahun 1970-an, yaitu kelompok Simanying yang berhaluan modernis dan kelompok Cikaliung yang berhaluan tradisionalis.

Dinamika perdebatan pemikiran agama semakin meningkat ketika kiai Nafsirin Hadi yang dekat dengan kelompok Isa Bugis dan kiai Abdul Fatah memperkenalkan pemikiran yang lebih rasional seperti metode ta'wil terhadap ayat-ayat Al Qur'an dan menolak berbagai istilah *adjective* terhadap Islam. Datangnya para alumni Timur Tengah menambah dinamis perdebatan agama di kalangan warga MA. Kiai Wahid banyak memperkenalkan perilaku yang baru dalam Perguruan Pusat seperti pengenalan jilbab yang lebih dekat dengan model Timur Tengah daripada model kerudung dan kebaya lokal.

Bagaimana dengan kelompok tradisionalis yang diwakili oleh Yamisa, Kiai Burhani dan lain-lain. Kelompok ini dalam kenyataannya terus bertahan meski dalam posisi terdesak. Keadaan berubah setelah Mukhtar 1985 dimana kelompok tradisionalis tampil sebagai pucuk pimpinan dan tersingkirnya kelompok Nafsirin dan Wahid Sahari. Dalam beberapa keputusan Majelis Fatwa nampak jelas sekali upaya untuk kembali mengangkat isu Ahlussunnah Wal Jamaah yang dekat dengan konsep Aswajanya kaum nahdiyyin. Namun demikian upaya ini tidak sepenuhnya berhasil karena munculnya penentangan dari faksi modernis dan puritan. Pertentangan pendapat ini akhirnya dimediasi oleh PB lewat pembentukan apa yang kemudian dikenal dengan istilah Khittah Mathla'ul Anwar. Teks khittah ini secara jelas menunjukkan upaya kompromi dari berbagai pemikiran agama yang berkembang atau dikembangkan oleh warga MA.

Mathla'ul Anwar Ke Depan

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, antara lain: pertama, sejak didirikan sampai kemudian berkembang menjadi organisasi nasional, kepemimpinan MA masih sangat terbatas pada mereka yang berasal dari Banten. Kiai Nafsirin Hadi yang berasal dari Aceh merupakan pengecualian karena ia bukan alumni sekaligus berasal dari Banten. Namun ia tetap memiliki kaitan dengan Banten lewat istrinya yang asli Menes. Dominasi, kalau tidak bisa dikatakan hegemoni, Banten telah memunculkan banyak kritik dari warga MA yang berasal dari wilayah di luar Banten. Mereka sering kali bertanya apakah MA benar-benar organisasi yang bersifat nasional atau tidak. Tentunya sulit untuk menjawab pertanyaan di atas karena secara riil kekuatan utama MA memang terletak di Banten atau paling tidak Lampung. Sementara di daerah lain, MA sebagian besar hanyalah papan nama pengurus saja tanpa memiliki ikatan yang kuat dengan madrasah MA di Menes.

Dominasi Banten tentunya berdampak luas bagi isu keterwakilan daerah tidak hanya dalam struktur formal organisasi tetapi juga dalam diskursus keagamaan. Banyaknya cabang yang terbentuk paska Muktamar 1985 lebih mewakili kepentingan politik karena dalam perluasannya lebih banyak menggunakan instrumen Golkar dan Departemen Agama. Madrasah yang menjadi unsur paling utama dalam pembentukan cabang di tingkat lokal seperti yang terjadi pada tahun 1930-an dan 1960-an tidak lagi menjadi prioritas utama pada tahun 1990-an. Mathla'ul Anwar yang pada awalnya didirikan untuk pembaharuan pendidikan Islam tidak lagi memiliki konsern yang kuat terhadap pendidikan dalam upayanya menjadi organisasi sosial nasional.

Keterpinggiran madrasah oleh pertimbangan politis semakin problematis manakala pada saat yang sama justru madrasah-madrasah MA mengalami kesulitan baik financial maupun unsur pendidikan lainnya. Kegagalan dalam *manstreaming* pendidikan diperparah oleh semakin dominannya Negara dalam penentuan

sistem pendidikan sehingga memberikan ruang yang relative sempit bagi organisasi payung untuk mengatur secara baku dan *rigid* tentang aturan dan materi pendidikan. Belum lagi jika dikaitkan dengan pemberlakuan otonomi daerah dimana sekolah/madrasah di satu kabupaten memperoleh perlakuan yang berbeda dengan sekolah/madrasah di tempat lainnya karena perbedaan kebijakan, visi dan kekayaan daerah-daerah tersebut. Organisasi payung menjadi hanya tempat *sharing ideas* tanpa secara langsung mampu merubah ketentuan yang berlaku pada tingkat lokal di daerah.

Signifikansi organisasi payung semakin dipertanyakan manakala terjadi perubahan paska reformasi dan munculnya keterbukaan. Munculnya organisasi-organisasi sosial Islam yang baru memberikan alternatif bagi kaum Muslim untuk menentukan afiliasinya secara khusus. Bahkan tidak jarang ada kaum Muslim yang menjadi aktifis di berbagai organisasi yang terkadang bertentangan visi dan misinya. Krisis signifikansi organisasi sosial semakin nampak ketika kaum Muslim menikmati liberalisasi informasi akibat globalisasi dan diseminasi otoritas keagamaan akibat liberalisasi referensi agama dewasa ini. Fatwa-fatwa dewasa ini dapat diperoleh dan dibaca dengan mudah tanpa harus terlebih dahulu mengadakan agenda *bahstul masail* seperti yang dilakukan oleh organisasi sosial Islam selama ini.

Keberhasilan gerakan demokratisasi di Indonesia telah melahirkan kesadaran baru di masyarakat akan signifikannya posisi mereka dalam menentukan arus politik baik di tingkat daerah maupun nasional. Pola kepemimpinan kharismatik dan berdasarkan jumlah massa semakin kehilangan momentumnya seiring dengan semakin otonomnya warga masyarakat untuk menentukan pilihannya. Menjadi ketua umum suatu organisasi besar tidak menjadi jaminan suksesnya jalan politik yang dilalui oleh sosok tersebut seperti yang terjadi pada Ketua Umum PBNU dalam pemilu 2004 dan Ketua Umum PBMA pada pemilihan gubernur Banten yang lalu. Dengan kata lain konsep dan pola penggalangan

massa lewat pernyataan kebulatan tekad seperti yang terjadi pada tahun 1986 tidak lagi relevan dalam konteks politik kontemporer.

Penutup

Pertanyaan mengapa MA tidak banyak dikenal publik sebagian telah terjawab lewat uraian diatas. Pertanyaan yang relevan sekarang adalah bagaimana MA ke depan. Jawabannya akan sangat tergantung pada bagaimana MA menjawab empat tantangan diatas yaitu dehegemonisasi Banten, *mainstreaming* pendidikan, liberalisasi referensi dan diseminasi otoritas keagamaan, dan pluralisasi politik.

Wa Al-Lahu 'Alam Bi al-Shawab.